
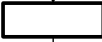
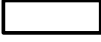
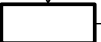
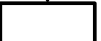
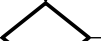
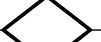

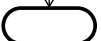




**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIT FASILITASI BAHAN DAN ANALISA**

Nomor SOP	
Tgl. Pembuatan	
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan <u>DR. Mualimin Abdi, SH, MH.</u> NIP. 19621121 198203 1 001
NAMA SOP :	Penyusunan Telaah
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan analitis.2. Mempunyai kemampuan pemilahan data
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Kasubdit Fasilitasi Bahan dan Analisa	Kasi Analisa, Laporan dan Dokumentasi	Pelaksana (JFU)	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menugaskan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan untuk menyusun telaah						Permohonan telaah/pendapat hukum & lembar disposisi		disposisi
2	Menugaskan Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Bahan dan Analisa untuk menyusun telaah/pendapat hukum						Permohonan telaah/pendapat hukum & lembar disposisi	10 menit	disposisi
3	Menugaskan Kepala Seksi Analisa, Laporan dan Dokumentasi agar melakukan penyusunan telaah/pendapat hukum						Permohonan telaah/pendapat hukum & lembar disposisi	10 menit	disposisi
4	Menugaskan Staf untuk melakukan penyusunan konsep telaah/pendapat hukum						Permohonan telaah/pendapat hukum & lembar disposisi	10 menit	disposisi
5	Menyusun konsep telaah/pendapat hukum untuk diserahkan ke Kepala Seksi Analisa, Laporan dan Dokumentasi						Konsep telaah/pendapat hukum	1 hari	konsep analisis Putusan MK
6	Menyusun telaah/pendapat hukum untuk dikoreksi Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Bahan dan Analisa						telaah/pendapat hukum	2 jam	telaah/pendapat hukum
7	Mengkoreksi hasil penyusunan telaah/pendapat hukum untuk diserahkan ke Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan						telaah/pendapat hukum	2 jam	telaah/pendapat hukum
8	Menandatangani telaah/pendapat hukum untuk diserahkan ke Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan						telaah/pendapat hukum	1 jam	telaah/pendapat hukum
9	Menerima telaah/pendapat hukum yang telah ditandatangani oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan						telaah/pendapat hukum		

Keterangan
Y = Ya; T = Tidak